



# RENCANA KERJA



## KANTOR CAMAT BOLANGITANG BARAT 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

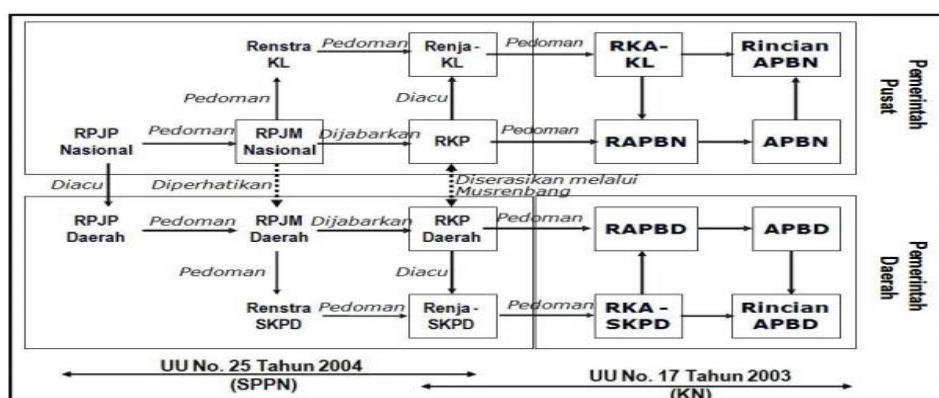
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Bolangitang Barat menyusun Renja Kecamatan Bolangitang Barat Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Renja Kecamatan Bolangitang Barat Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Bolangitang Barat Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bolangitang Barat Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan, b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan, d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.





## **1.2. Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
- 8) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2015 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 103.



## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Renja Tahun 2024 Kecamatan Bolangitan Barat disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2018-2023 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bolangitang Barat dan Pencapaian  
Renstra Kecamatan Bolangitang Barat s/d Tahun 2023**

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Renstra 2018-2023	Realisasi s/d 2021	Target Realisasi Kinerja 2022			Target Renja 2023	Perkiraan Capaian Renstra s/d 2023	
				Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	%		Realisasi 2023	%
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100	98.20	100	99.36	99.36	100	97.56	97.56
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	99.99	100	99.37	99.37	100	99.99	99.99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	100	99.99	100	99.37	99.73	100	99.99	99.99
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Tugas ASN	100	99.99	0	0	0	100	99.99	99.99
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	100	93.87	100	99.94	99.94	100	93.81	93.81
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	24 Pasang	22 Pasang	100	0	0	24 Pasang	22 Psg	91.66



Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan yang diikuti/dilaksanakan	8 Kali	0	8 Kali	1 Kali	99.94	8 Kali	9 Kali	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	98.70	100	98.62	98.62	100	97.32	97.32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	0	12 Bln	0	0	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	40 Buah	0	40 Bh	38 Buah	99.49	40 Bh	40 Bh	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak/Penggandaan yang diadakan	2 Item	0	2 Item	2 Item	99.99	2 Item	2 Item	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	0	20 Kali	20 Kali	98.52	20 Kali	20 Kali	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Pemenuhan Barang Milik Daerah	100	0	100	99.96	99.96	100	100	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan yang diadakan	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	1 Unit	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	5 Unit/Jenis	0	5 U/J	0	0	5 U/J	5 U/J	100
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah/Jenis Mesin Lainnya yang diadakan	4 Unit/Jenis	3 Unit/Jenis	3 Unit	1 Unit	99.96	4 U/J	4 U/J	100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor	100	0	100	0	0	100	100	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99.96	100	99.96	99.96	100	99.92	99.92
	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100	99.95	100	100	100	100	99.95	99.95
	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	99.99	99.99	100	99.99	99.99
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	88.76	100	98.59	98.59	100	87.35	87.35
	Persentase Kendaraan Dinas yang terpelihara	100	99.97	100	98.59	98.59	100	98.56	98.56
	Persentase Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya yang Terpelihara	100	99.02	100	100	100	100	99.02	99.02
	Jumlah Gedung yang di Rehabilitasi /dipelihara	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	1 Unit	100



Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Kebijakan Pelayanan yang dilaksanakan dengan Baik	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kegiatan Pemerintahan	100	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Kegiatan	0	0	0	0	1 Keg	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi pemberdayaan Desa	100	98.55	18 Ds	18 Ds	100	100	100	98.55
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</b>	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan tepat waktu	18 Desa	18 Desa	18 Ds	18 Ds	100	18 Ds	18 Ds	98.55
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa	18 Desa	18 Desa	18 Ds	18 Ds	100	18 Ds	18 Ds	98.55

Perencanaan Pembanguna di Desa									
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan TRANTIBUM	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah</b> Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda/Perkada yang diterapkan dengan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	0	0	5 Keg	1 Keg	100
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kantrantibmas	1 Laporan	1 Laporan	1 Lap	0	0	5 Lap	1 Lap	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan LPPD tepat waktu	100	76.71	100	0	0	100	76.71	76.71
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang meneyelesaikan Kegiatan tepat waktu	18 Desa	18 Desa	18 Ds	0	0	18 Ds	18 Ds	100
	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	18 Desa	18 Desa	18 Ds	0	0	18 Ds	18 Ds	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Bolangitan Barat didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bolangitan Barat

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bolangitang Barat	77	80	85	85	85	77	80	85	85	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	BB	A	A	A	B	BB	A	A	-

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Bolangitang Barat menyelenggarakan urusan fungsi lainnya serta tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan. Terdapat beberapa isu penting yang berkembang, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur, manajemen dan kinerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi belum optimal;
- 2) Peningkatan sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi pemerintahan belum terpenuhi secara memadai;
- 3) Pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan belum didukung data yang valid dan *uptodate*
- 4) Perlu adanya pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan secara proporsional dan penyiapan SDM pendukung;
- 5) Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan belum optimal dalam melaksanakan koordinasi sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan.
- 6) Belum adanya Peraturan ditingkat Kabupaten yang mengatur tentang manajemen aparat pemerintah desa.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bolangitan Barat Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

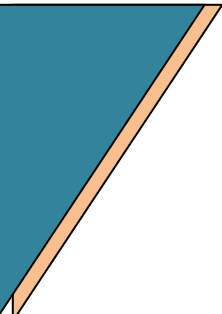
Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Juta)	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Pagu (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	20		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	20		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26		
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak/Penggandaan yang disediakan	2		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak/Penggandaan yang disediakan	2		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi/Konsultasi	25		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan yang disediakan	2		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan yang disediakan	2		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5		
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	9		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	9		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1		



Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor yang disediakan	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor yang disediakan	1		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	7		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	7		

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1		



Dari **Tabel 2.3** di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat 8 (delapan) Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 karena keterbatasan Anggaran yang tersedia, yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Pengadaan Mebel
5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari 8 (delapan) Sub Kegiatan diatas, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan Lainnya (**Pembuatan Pagar Kantor**) dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** sudah 5(lima) tahun tidak pernah dilaksanakan padahal sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedang sub kegiatan lainnya sudah 2(dua) Tahun tidak dilaksanakan Karena kekurangan ketersediaan anggaran.



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

.....

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kecamatan Bolangitang Barat berpedoman pada RPJMD 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang secara konseptual berpedoman pada Renstra Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan, senantiasa memperhatikan kebijakan Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan diantaranya terdapat pada Renstra Kemendagri 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bolangitang Barat yaitu sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragam budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Bolangitang Barat adalah Implementasi dari Rencana Strategi Kecamatan Bolangitang Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bolangitang Barat memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu :

***"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel"*** Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)
- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
-



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu tahun kedepan, Kecamatan Bolangitang Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut: "***Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah***"

Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	<b>Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pada dasarnya pemilihan program didasarkan pada adanya kebutuhan dalam mewujudkan tujuan sebagai kinerja yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu, program yang ditetapkan harus berkaitan tugas, fungsi dan kewenangan urusan pemerintahan yang diampuh oleh perangkat daerah.

Program	Uraian Pertimbangan Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Sebagai perangkat daerah,kecamatan memiliki cakupan kewenangan urusan yang harus dilaksanakan yang bersifat menunjang pelaksanaan urusan kongkuren yang diampuh oleh Perangkat Daerah Lainnya.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

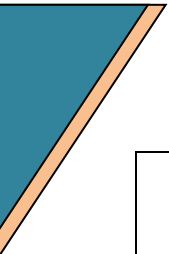
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bolangitang Barat Tahun 2024 serta perkiraan maju tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Bolangitang Barat Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1. berikut:

**TABEL4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Urusan SKPD/Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
		Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolangitang Barat	100 %		APBD	-	100 %	
<b>1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bolangitang Barat	100%		APBD		100%	
	Persentase Ketersediaan		20				20	
<b>1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Bolangitang Barat	100 %				100 %	
			26 Paket				26 Paket	
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		7 Orang				7 Orang	

<b>1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Bolangitang Barat	100 %				100 %	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25 Paket				25 Paket	
<i>Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40 Buah				40 Buah	
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket				2 Paket	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan				25 Laporan	
<b>1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Bolangitang Barat	100 %				100 %	
<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit				2 Unit	
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Paket				5 Paket	
<i>Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit				9 Unit	
<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit	

	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit	
<b>1.5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Bolangitang Barat	100%				100%	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan				12 Laporan	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan				6 Laporan	
<b>1.6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Bolangitang Barat	100%				100%	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		7 Unit				7 Unit	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit				8 Unit	



<i>Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit					1 Unit	
---	---	--	--------	--	--	--	--	--------	--



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Usulan program, kegiatan dan pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bolangitang Barat semata-mata dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan, khususnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diantaranya:

1. Kecamatan disamping sebagai perangkat daerah yang memiliki cakupan tugas, fungsi dan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana umum di wilayah, juga mengampuh kewenangan atributif berbasis territorial/kewilayahan terutama dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
2. Dalam rangka mewujudkan semangat otonomi daerah yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan ke Camat.
3. Sampai dengan Renja tahun 2023, usulan tentang pembangunan Pagar Kantor belum pernah disetujui untuk penyediaan Anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keamanan kantor, serta kelayakan kantor pemerintahan, maka dimohon kiranya agar dana pembangunan Pagar Kantor tahun 2024 dapat disetujui.

Demikian Renja Kecamatan Bolangitang Barat ini disusun untuk memenuhi kewajiban ketersediaan dokumen perencanaan serta sebagai pedoman perencanaan dan kebijakan program dan kegiatan Tahun 2024.

Bolangitang Barat, Juli 2024

**CAMAT BOLANGITANG BARAT**



**KAMIL PONTOH, S.Sos**

**NIP. 19800402 201001 1 005**